



ISSN Print 2615-5648
ISSN Online 2615-174X

Kantor Editor: Lantai 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, Indonesia

Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Jawa Tengah 531226 Indonesia

Telp.: +62281-635624 Fax. +62281- 636653

E-Mail: Volksggeist@uinsaizu.ac.id

Website : <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/Volksggeist>

Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Article	Abstract
Author Anggita Yudanti^{1*}, Wicipto Setiadi², ^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Corresponding Author: *Anggita Yudanti, Email: anggitayudanti@upnvj.ac.id Data: Received: 26 Juni 2021 Accepted: 22 Juni 2022 Published: 30 Juni 2022 DOI: DOI 10.24090/VOLKSGEIST. V5I1.4973	In the context of development, laws and regulations are also a means to support the realization of development goals. The focus of this research is what makes regulations in Indonesia still problematic and what actions must be taken so that the regulatory planning and the regional development planning can be carried out carefully so as to produce good legal products. The method used in this research is a normative approach. Primary data are collected from legislation while secondary data are from books, journals and legal articles. The data are then analyzed in a qualitative descriptive technique. The results found that legislative planning and development planning are not integrated so that they are not synchronized and harmonious because there is a separation of schemes; there is a tendency for excessive formation of Ministerial regulations; and the weakness of the planning institutions for the formation of Governmental and Presidential Regulations. Efforts to synchronize the planning system between the center and the regions are needed so that the regulations formed run systematically and sustainably. Keywords: <i>Formation of regulations; harmonization; regional development.</i> Dalam konteks pembangunan, peraturan perundang-undangan juga menjadi sarana untuk mendukung perwujudan tujuan pembangunan. Fokus dalam penelitian, apa yang menjadikan regulasi di Indonesia ini masih bermasalah dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar regulasi mengenai perencanaan peraturan dengan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia dapat terlaksana dengan secara matang sehingga menghasilkan produk hukum yang baik. Metode yang digunakan yaitu pendekatan normative; bahan primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan sekunder antara lain buku, jurnal maupun artikel hukum. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik penulisan deskriptif. Hasil yang ditemukan menunjukkan perencanaan legislasi dan perencanaan pembangunan tidak terintegrasi sehingga tidak sinkron dan harmonis karena ada pemisahan skema, kecenderungan pembentukan peraturan Menteri yang berlebihan dari segi kuantitas, serta lemahnya lembaga pembentuk perencanaan pembentukan PP dan Perpres. Upaya sinkronisasi sistem perencanaan

yang terintegrasi antara pusat dan daerah diperlukan sehingga regulasi yang terbentuk berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Pembentukan regulasi; harmonisasi; perencanaan pembangunan daerah.*

©2022; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan bagian dasar dari manajemen pembangunan. Menurut Profesor Widjojo Nitisastro, perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal. Yang pertama adalah secara sadar menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu berdasarkan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua adalah memilih alternatif yang efisien dan masuk akal untuk mencapai tujuan tersebut.¹ Maka dalam rangka suatu perencanaan pembangunan perlu untuk diperhatikan baik agar suatu perencanaan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Di Indonesia sebagai negara hukum, setiap perencanaan pembangunan harus memiliki produk hukum untuk menjalankan prosedur pembangunan yang selaras atau harmonis dan tentunya memiliki kepastian hukum agar dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri tidak memiliki permasalahan yang mengakibatkan ketidakdisiplinan regulasi satu sama lain. Mengingat perlu untuk diketahui bahwa legislasi mengandung makna dikotomis yang bisa berarti proses pembentukan hukum dan juga bisa berarti hasil produk hukum itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi produk hukum itu sendiri masih bermasalah dengan ditandai problematika yang masih menghantui.

Problematika seperti regulasi yang tumpang tindih, ketidak harmonisan peraturan satu sama lain dan regulasi yang berlebihan dari segi kuantitas. Padahal peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam negara hukum untuk menjalankan upaya pencapaian tujuan nasional, sehingga sudah seharusnya dari peraturan itu sendiri tidak boleh ada yang bermasalah. Seringnya UU dibuat tanpa perencanaan sistematis atau biasa dibentuk dengan cara-cara spontan, hal ini disebut dengan istilah kesemrawutan perencana pembuat UU.² Dalam konteks pembangunan, peraturan perundang-undangan juga menjadi sarana untuk mendukung perwujudan tujuan pembangunan. Kedudukannya memberikan legitimasi dan legalitas bagi tindakan-tindakan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan pembangunan. Peran itu dapat dicapai dengan prasyarat bahwa peraturan perundang-undangan berada dalam suatu sistem yang baik dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Disinilah peran hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (*law as tool of social engineering*).³

¹ Lazarus Sinaga, Fakultas Ekonomi, and Universitas Pancasila, "Teknik Perencanaan Tenaga Kerja PT. Unilever TBK," *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic* 10, no. 1 (2019): 8–18.

² Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2017): 198, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.199-207>.

³ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (June 7, 2018): 53–63, <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1731>.

Tentunya dalam pembangunan terdapat perencanaan yang dilakukan agar terpenuhinya capaian tujuan yang sistematis berkelanjutan dan tidak menimbulkan masalah kedepannya karena Perda yang bermasalah dan menghambat iklim investasi tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap produk legislator daerah. Sebab lemahnya pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap Raperda apabila pengawasan dilakukan baik oleh pusat maka tidak akan banyaknya perda-perda yang bermasalah dan tumpang tindih.⁴

Apabila terdapat kegagalan menciptakan sistem peraturan perundang-undangan yang baik maka akan berakibat pada kondisi sebaliknya, yaitu peraturan perundang-undangan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi itu yang kini terjadi di Indonesia. Permasalahan terkait sistem perundang-undangan sering menjadi penghambat dalam berbagai aspek interaksi sistem bernegara dan bermasyarakat. Sebagai contoh yang digambarkan oleh Wicipto Setiadi bahwa satu sektor tertentu menjadi bermasalah dalam pelaksanaannya karena ada beberapa regulasi yang mengaturnya atau saling terkait, karena diatur dalam beberapa regulasi, dampaknya akan terjadi saling konflik antar regulasi.⁵ Legalitas dan legitimasi suatu Perda tidak hanya ditentukan oleh materi muatan Perda yang telah bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi keabsahan suatu Perda sangat ditentukan oleh prosedur pembentukannya salah satunya pada tahap perencanaan.⁶ Perencanaan ini akan menentukan keberhasilan suatu produk hukum apabila dilaksanakan dalam proses yang baik.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang masih terjadi terkait produk hukum yang bermasalah terkait perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan dapat memberikan manfaat dalam perencanaan produk hukum Indonesia dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan proses perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Fokus pada artikel ini apa yang menjadikan regulasi di Indonesia saat ini masih bermasalah dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar regulasi mengenai perencanaan peraturan dengan perencanaan pembangunan di Indonesia dapat terlaksana dengan secara matang sehingga menghasilkan produk hukum yang baik.

Selain itu artikel ini menunjukkan tidak terintegrasinya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan, kemudian bahwa secara hierarki, regulasi semakin ke bawah akan semakin banyak serta sinergitas antara perencanaan perundang-undangan dan perencanaan kebijakan pembangunan, baik tingkat pusat maupun daerah yang masih dikatakan lemah dari segi keefektivitasan terkait pembangunan daerah. Maka dalam artikel ini akan menjabarkan beberapa penyebab dan seberapa pengaruhnya kebijakan sebelumnya terkait regulasi yang telah jadi, sehingga dapat ditemukan permasalahan itu sendiri selama pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pembentukan regulasi pembangunan daerah-daerah.

⁴ Yuli Asmara Triputra, "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Lex Librum*, III, no. 1 (2016):426.

⁵ Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan *Omnibus Law*," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 9, no. 1 (2020)39-52.<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408>

⁶ Asri Lasatu, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 201, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>.

Artikel ini didasarkan pada argumentasi bahwa proses pembentukan regulasi di Indonesia masih bermasalah mengenai perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini terjadinya pemborosan regulasi di mana tiap-tiap proses perencanaan tersebut menyusun regulasi berdasarkan pada kebutuhan perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi. Persoalan ini akan bertambah rumit dengan adanya tumpang tindih pengaturan di antara regulasi-regulasi yang dibentuk tersebut.

Pada situasi seperti ini, proses pembangunan berpotensi terhambat karena kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang direncanakan maupun yang dibentuk. Sistem perundang-undangan yang baik perlu dibangun sebagai penopang prinsip negara hukum. Kualitas terjaminnya prinsip negara hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi regulasi di Indonesia. Regulasi yang tidak efektif dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan pengaruh negatif bagi eksistensi negara hukum tersebut. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dapat mengambil jarak dengan hukum. Tingkat kepercayaan dan ketergantungan masyarakat terhadap hukum juga akan mengalami penurunan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan ini yaitu oleh Arfan Faiz Muhlizi yang berjudul *“Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”* menjelaskan bahwa teori hukum integratif memberikan pencerahan mengenai relevansi Pancasila dan arti penting hukum dalam menjalankan fungsi stabilitas untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing serta kebutuhan yang perlu dilakukan pemerintah dalam penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kemudian hasil penelitian Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas yang berjudul *“Problematika Model Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca-Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* menjelaskan bahwa rencana pembangunan nasional memunculkan banyak wacana untuk menetapkan kembali GBHN yang dinilai lebih pantas menjadi pedoman rencana pembangunan nasional atas permasalahan inkonsistensi dan diskontinuitas.⁷

Adapun penelitian oleh Eka N.A.M Sihombing yang berjudul *“Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah”* menjelaskan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas yang menjadi problematika.⁸ Berdasarkan dari ketiga hasil penelitian tersebut, artikel ini akan membahas problematika yang terjadi dalam perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah yang dilihat dari adanya pemisahan skema, beberapa masalah yang mendukungnya, diolah dari data baru serta adanya potensi-potensi yang menimbulkan masalah dikedepannya.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif perundang-undangan. Dengan data kualitatif bersifat sekunder. Pembahasan diarahkan pada penelusuran kepustakaan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, jurnal, internet dan hasil penelitian yang

⁷ Dymas Yulia Putri Kusumaningtyas, “Problematika Model Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca-Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Ummul Qura* XI, no. 1 (2018): 1–15.

⁸ Eka NAM Sihombing, “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2018): 285–95, <https://doi.org/10.31219/osf.io/dguc2>.

berkaitan dengan objek yang dibahas. Pengumpulan data dilengkapi dengan artikel hukum dari internet atau artikel ilmiah lainnya serta peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik penulisan deskriptif analisis yang menguraikan permasalahan berdasarkan pengamatan dan literatur, pendapat ahli serta disusun secara sistematis dari hasil inventarisasi pengumpulan data.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tidak Terintegrasinya Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Dalam konteks pembangunan, peraturan perundang-undangan merupakan sarana untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan. Prasyarat untuk mewujudkan peran ini adalah sistem hukum yang sehat dan kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kegagalan untuk membentuk sistem peraturan perundang-undangan yang baik akan mengakibatkan keadaan sebaliknya, yaitu peraturan perundang-undangan menjadi penghambat utama pembangunan dan pelaksanaannya. Situasi ini sedang terjadi di Indonesia. Masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem hukum seringkali menjadi penghambat interaksi antara negara dan sistem sosial. Masalah ini juga perlu dilihat dari perspektif ekonomi dan hukum. Dari perspektif hukum ekonomi, masalah utama yang dihadapi adalah tumpang tindih atau bahkan kontradiksi antara satu jenis peraturan dengan jenis peraturan lainnya. Hal ini merupakan pelanggaran besar dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, yang tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan dan hilangnya satu kesatuan politik hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah-masalah tersebut dapat digolongkan sebagai masalah legislatif, yang berkaitan langsung dengan penataan substansi hukum.

Di Indonesia, ada dua dokumen terkait rencana pembangunan dan rencana penyusunan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi dokumen pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang statusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Di tingkat nasional, dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sementara di tingkat daerah, dokumen perencanaan pembangunan meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis satuan kerja mesin daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan Renja SKPD. Kemudian, dokumen perencanaan legislasi meliputi dokumen perencanaan legislasi nasional dan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dokumen perencanaan legislasi meliputi dokumen perencanaan legislasi nasional dan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU PPP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di tingkat pusat, dokumen perencanaan legislatif meliputi rencana legislatif nasional (Prolegnas), rencana prioritas tahunan, rencana penyusunan peraturan pemerintah (Progsun PP), rencana penyusunan peraturan presiden (Progsun Perpres) dan rencana legislatif

Kementerian/Lembaga (K/L). Legislasi tingkat Dokumen perencanaan mencakup pembentukan rencana pengawasan daerah provinsi dan kabupaten/kota (Propem Perda).

Tabel 1: Perbandingan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Legislasi

No	Tingkat Perencanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen Perencanaan Legislasi
1.	Perencanaan Pusat/ Nasional	RPJPN (Pasal 3 ayat (3) UU No 25/2004 RPJMN (Pasal 3 ayat (3) UU No 25/2004 Renstra K/L (Pasal 6 ayat (1) UU No 25/2004 Renja K/L (Pasal 6 ayat (2) UU No 25/2004	Prolegmas (Pasal 16 UU No 12/2011) Program Prioritas Tahunan (Pasal 20 ayat (5) UU No 12/2011) Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Pasal 24 UU No 12/2011) Program Penyusunan Peraturan Presiden (Pasal 30 UU No 12/2011) Perencanaan Peraturan Perundang-undangan K/L (Pasal 42 UU No 12/2011)
2.	Perencanaan Daerah	RPJPD (Pasal 5 ayat (1) UU No. 25/2004) RPJMD (Pasal 5 ayat (2) UU No. 25/2004) Renstra SKPD (Pasal 7 UU No. 25/2004) RKPD (Pasal 5 ayat (3) UU No. 25/2004) Renja SKPD (Pasal 7 ayat (2) UU No. 25/2004)	Propem Perda Provinsi (Pasal 97 UU 23/2014 Pasal 32 UU No. 12/2011) Propem Perda Kab/Kota (Pasal 39 UU No. 12/2011 dan Pasal 150 UU No. 23/2014)

Sumber: Diani et.al Sadiawati, *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*, Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 15.

Dari tabel diatas menunjukan perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi yang tergambar adanya dua sistem perencanaan instrument pembangunan yang sebenarnya saling terkait. Perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya akan memerlukan dukungan kerangka regulasi, yang mana disisi lain perencanaan regulasi atau legislasi pun memerlukan arah agar sesuai dengan pencapaian tujuan nasional melalui pembangunan. Hal ini justru menjadi penyebab perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi tidak sinkron dan tidak harmonis sebab adanya pemisahan skema.

Keadaan ini menyebabkan pemborosan peraturan perundang-undangan, dimana setiap proses perencanaan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan perencanaan legislatif. Kemudian persoalan ini akan semakin diperumit dengan adanya tumpang tindih pengaturan antar peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, karena kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan rencana atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka proses pembangunan dapat terhambat.

Faktor lainnya adalah dualitas perencanaan dalam aspek kelembagaan pengelolaan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), selain perencanaan legislasi, termasuk legislasi administratif, juga dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tidak terintegrasinya kelembagaan yang menyusun rencana pembangunan dan rencana legislatif mengakibatkan inefisiensi biaya dan prosedur yang harus ditempuh. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan untuk memastikan bahwa proses perbaikan sistem hukum dan regulasi berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam hal menuju pembangunan yang berkelanjutan, dalam jurnalnya Maret Priyanta menjelaskan bahwa terselenggarakannya pembangunan diwujudkan melalui perencanaan terhadap pembangunan perlu melakukan peningkatan kualitas dalam proses penyusunan rencana karena hukum menentukan arah pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹

Upaya yang dapat dilakukan agar permasalahan perencanaan peraturan perundang-undangan yang hasilnya tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan adalah sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan pada tingkat pusat maupun tingkat daerah diantaranya dengan membuat transformasi program seperti pembentukan sistem kerangka peraturan menjadi sistem perencanaan yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dan perencanaan legislatif. Kedua, menjalankan peran koordinasi antara Bappenas dengan Kementerian Hukum dan HAM/Badan Pembangunan Hukum Nasional, dan mengintegrasikan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dengan perencanaan peraturan perundang-undangan, termasuk rencana legislasi nasional, rencana prioritas tahunan, rencana PP dan rencana peraturan presiden. Ketiga, dengan merumuskan kebijakan untuk mengkoordinasikan perencanaan regulasi tingkat daerah dengan perencanaan dan legislasi perencanaan pembangunan tingkat nasional. Keempat, merumuskan rencana evaluasi rutin terhadap sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah secara keseluruhan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Kita pun harus menyadari bahwa tujuan peraturan untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang secara efisien dan efektif apabila adanya keselarasan.¹⁰ Perlu adanya keselarasan satu sama lain dan jangan sampai hasil produk hukum dari proses perencanaan sudah salah penerapan diawalnya karena tidak ada sistem yang terintegrasi antara perencanaan pembangunan dan perencanaan peraturan perundang-undangan.

Kecenderungan Pembentukan Peraturan Menteri Yang Berlebihan Dari Segi Kuantitas

Setelah pembahasan diatas, yang menjadi permasalahan kedua menurut penulis yaitu adanya kecenderungan pembentukan peraturan Menteri yang berlebihan dari segi kuantitas dalam permasalahan perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Kuantitas yang berlebihan atas pembentukan peraturan Menteri diartikan jumlah regulasi saat ini

⁹ Maret Priyanta, "Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 337, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.113>.

¹⁰ Insan Tajali Nur, "Memantapkan Landasan Hukum Formil Sebagai Alat Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 2018, 158–174.

berlebihan atau terlalu banyak, yang mana apabila terus-terusan bertambah akan sangat berpotensi/ berpengaruh terhadap kualitas regulasi yang buruk dan mengarah pada ketidakharmonisan, tumpang tindih, konflik antar regulasi. Regulasi yang buruk akan berakibat pada regulasi yang saling bertentangan antara regulasi yang satu dengan regulasi lain seperti adanya tumpang tindih, multi tafsir, asas yang tidak ditaati, tidak berhasil, beban yang tidak perlu dan menimbulkan biaya tinggi. Adapun permasalahan kelembagaan dimana terdapat:

1. Ego sektoral lembaga, mengakibatkan tumpang tindih peraturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum; dan
2. Ego kedaerahan, dimana permasalahan peraturan daerah timbul karena potensi perpecahan antara daerah menjadi sebuah permasalahan yang muncul dalam sistem otonomi daerah.

Tentu saja beberapa permasalahan yang terjadi sudah menunjukkan bahwa regulasi yang sudah turut andil menyebabkan permasalahan tumpang tindih dan ketidak harmonisan regulasi yang sedang berjalan. Terlebihnya ego sektoral pun terjadi di pemerintahan daerah karena kurangnya koordinasi menjadi yang faktor penghambat dalam penyusunan Ranperda.¹¹

Untuk menguatkan pernyataan sebelumnya bahwa regulasi yang sudah ada turut andil menimbulkan permasalahan regulasi sebab pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengizinkan kementerian untuk mengeluarkan aturan berdasarkan kewenangan. Kewenangan ini tidak memberikan batasan atau membebaskan menteri dapat melakukan tindakan pembentukan peraturan tanpa harus terikat regulasi yang ketat dalam mengatur suatu tindakan yang harus dilakukan.¹²

Hal ini yang menjadi sarana kementerian menyalurkan ego untuk menerbitkan banyak peraturan. Walaupun UU PPP tersebut sudah dilakukan revisi akan tetapi tidak hanya itu nyatanya mayoritas Peraturan Menteri (permen) saat ini dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri atau kementerian bukan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga dampaknya banyak regulasi-regulasi lahir karena tidak adanya integrasi satu sama lain kementerian dan lembaga-lembaga yang ada dalam hal perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Lahirnya permen-permen baru dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan atau bertambahnya regulasi baru. Sebagai berikut:

Tabel 2: Jumlah Regulasi 2021

No	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	Peraturan Pusat	3621
2.	Peraturan Menteri	15464
4.	Peraturan LPNK	4046
5.	Peraturan Daerah	15982

Sumber: Dianalisis dari www.peraturan.go.id/ pertanggal 12 Maret 2021

¹¹ Taufik H. Simatupang, "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 12–25.

¹² Irfan Ardyana Nusantara, "Analisis Terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 39–52, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v4i1.4660>.

Tabel 3: Produk Hukum Tingkat Pusat Dan Daerah

No	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	Tingkat Pusat	60.616
2.	Tingkat Daerah	192.756

Sumber: Dianalisis dari <https://jdih.go.id/pertanggal> 12 Maret 2021

Tabel 4: Jenis Produk Hukum Tingkat Pusat

No	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	Undang-Undang Dasar	1
2.	Ketetapan MPR	13
4.	Undang-Undang	1.680
5.	Perppu	295
6.	Peraturan Pemerintah	4.664
7.	Peraturan Presiden	1.908
8.	Keputusan Presiden	8.610
9.	Instruksi Presiden	683
10.	Undang-Undang Darurat	178
11.	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi	48
12.	Peraturan Kementerian	34.235
13.	Peraturan Lembaga Negara	623
14.	Peraturan LPNK	5.184
15.	Peraturan Lembaga Non Struktural	2.491

Sumber: Dianalisis dari <https://jdih.go.id/pertanggal> 12 Maret 2021

Dari tabel diatas maka terlihat peraturan Menteri yang sudah jadi menimbulkan dampak terhadap lahirnya atau terbentuknya kembali peraturan-peraturan tingkat daerah seperti yang tergambar pada tabel 4 mengalami peningkatan yang cukup drastis dampaknya akan regulasi yang ada di tingkat daerah (lihat tabel 3). Hal ini menunjukkan pula bahwa secara hierarki, regulasi semakin ke bawah akan semakin banyak. Satu undang-undang dapat memunculkan Peraturan Pemerintah sekurang-kurangnya juga akan direspons dengan satu peraturan daerah disetiap daerah.¹³

Mengingat bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan dalam hal ini daerah yang dibentuk ialah untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah sehingga akan lebih sesuai dengan kebutuhan daerahnya khususnya kebutuhan masyarakatnya sebagai wewenang delegasi untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.¹⁴

Lemahnya Lembaga Pembentuk Perencanaan Pembentukan PP dan Perpres Untuk Memastikan Perpres Yang Dibentuk Pada Tahun Tertentu Sesuai Perencanaannya

Lemahnya lembaga pembentuk perencanaan pembentukan PP dan Perpres untuk memastikan seluruh perpres yang dibentuk pada tahun tertentu sesuai dengan perencanaannya pun menjadi

¹³ Arfan Faiz Muhli, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017):349, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>.

¹⁴ Rizki Ramadhan Faisal and Aidul Fitriadi Azhari, "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar Di Kota Serang," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 125-37, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4800>.

permasalahan keefektivitasan peraturan perundang-undangan, sebab saat ini yang terjadi adalah tidak adanya lembaga khusus pengawas untuk memastikan atau menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini pula yang berdampak pada regulasi yang bertentangan dengan perencanaan pembangunan daerah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dokumen perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah dengan dokumen perencanaan legislasi tidak sinkron karena memiliki 2 (dua) skema tersebut, mengatur hal yang sama namun pelaksanaannya yang berbeda-beda satu sama lain. Salah satu yang diatur dalam Perpres Nomor 87 tahun 2014 adalah penyusunan Prolegnas didasarkan pada sistem perencanaan pembangunan nasional rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN¹⁵. Kelemahan dalam mengatur teknis dari ketentuan tersebut adalah penyebaran kewenangan yang berada di antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan legislasi yang menuntut adanya jalur birokrasi yang semakin panjang dan risiko tidak sinkronnya perencanaan pembangunan dengan perencanaan legislasi. Persoalan serupa juga ditemukan pada perencanaan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini pada program susunan nasional PP dan program susunan Perpres.

Penyusunan program susunan PP ditanggung oleh Kemenkumham sedangkan program susunan Perpres dengan Bappenas yang bertanggung jawab menyusun rencana kerja pemerintah. Maka potensi tidak sinkronnya 2 (dua) skema tersebut akan terlihat dalam kerangka waktu penyusunan dokumen perencanaan nya. Apabila terdapat perbedaan waktu, tentu akan menimbulkan perbedaan kebutuhan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan regulasi. Kondisi yang melatarbelakangi kedua dokumen perencanaan itu dapat mengalami perubahan signifikan dan menyebabkan tidak bertemunya kebutuhan regulasi dengan apa yang diprioritaskan pembangunan nasional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nasional (PSHK) terkait perencanaan regulasi di tingkat pusat menemukan jumlah produk regulasi yang diundangkan terhitung besar, tetapi data periode 2014-2018 menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, mengalami pengurangan jumlah¹⁶. Walaupun sudah mengalami penurunan akan tetapi masih berjalan permasalahan hingga saat ini terutama pelaksanaan regulasi-regulasi yang ada, sebab terdapat tumpang tindih regulasi (*overlapping regulations*).

Untuk jenis peraturan menteri, banyak upaya yang perlu dilakukan untuk membantu upaya simplifikasi regulasi. Kemungkinan munculnya Peraturan Menteri menabrak banyak regulasi lain, tetapi juga mengabaikan wewenang Presiden. Hal ini merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan, sebelum masalah penerbitan peraturan menteri lebih muncul sebagai ego lintas sektoral. Serta penulis berpendapat bahwa UU PPP yang telah direvisi perlu kembali direvisi, karena perlu dilakukan untuk memberikan pembatasan kepada kementerian untuk mengeluarkan peraturan dan tentunya dapat memperjelas serta memberikan jaminan partisipasi publik diakomodasi dalam pembentukan undang-undang. Namun berdasarkan pengalaman Penulis saat mengikuti proses perancangan Peraturan Menteri, terdapat Kementerian yang telah melakukan upaya

¹⁵ Lihat pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

¹⁶ Diani et.al Sadiawati, *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*, Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

pencegahan dengan mengadakan seminar dan mengundang narasumber-narasumber yang ahli dan berpengalaman dalam bidang pembentukan peraturan di Indonesia. Tentunya hal ini merupakan suatu kemajuan bahwa Kementerian telah mengupayakan tindakan preventif dalam pembentukan peraturan yang sebenarnya masih terlihat pengeluaran regulasi yang tergolong banyak seperti yang tersirat dalam data gambar diatas. Mengingat potensi masalah yang ada wewenang untuk membentuk dan mengharmonisasikan perundang-undangan perlu dikembalikan ke Pemerintah Daerah. Sebab banyak peraturan yang mengatur hal yang sama dari satu peraturan ke peraturan lainnya.

Oleh karena itu, menunjukkan proses perencanaan dan perancangan regulasi di tingkat eksekutif. Diperlukan sinergi antara perencanaan legislasi dan perencanaan kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Minimnya prosedur pengawasan dan evaluasi regulasi, serta kurangnya lembaga khusus yang menangani semua aspek sistem perundang-undangan akan sama dengan menimbulkan *hiper-regulasi*. Hal ini terkait dengan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, dan belum menjadi bagian penting dari sistem perundang-undangan, karena fungsi pengawasan tidak termasuk dalam tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.¹⁷

Pengaturan kelembagaan selama ini hanya sebatas pada kewenangan dalam pembentukan peraturan proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan tanpa memperhatikan fungsi pengawasan dan pengevaluasian dalam proses perencanaan dan pembentukannya.

Penyusunan peraturan pemerintah dan Perpres perlu berkenaan dengan dasar pembentukan penyelenggaraan pemerintahan terencana dan tidak bersifat reaktif. Materi dari Perpres bukan materi yang diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk melakukan pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai contohnya penindaklanjutan dari *Infrastructure Summit 2005* oleh pengaturan dari Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.¹⁸

Adapun menurut Purnomo Sucipto, mengemukakan pendapatnya yang pada intinya kekurangan dari peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga eksekutif, ketika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang tidak jelas atau tidak diatur, cenderung membuat ketentuan yang menguntungkan dirinya.¹⁹ Ego kementeriankah?

Kunci keberhasilan reformasi regulasi adalah memiliki lembaga yang sesuai dan berwibawa serta dukungan sumber daya manusia yang kuat, bukan dari partai politik atau orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik, tetapi sumber daya manusia yang profesional dengan pengalaman dan pemahaman yang nyata. Baik dari aspek teoritis dan praktis, serta disiplin ilmu lain yang mendukung regulasi dan IT yang hebat, untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, sehingga akan mengurangi atau menghilangkan ego sektoral yang menonjol. Lembaga pembentukan peraturan dapat dikatakan urgen karena banyaknya lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan sehingga parameter lemahnya lembaga khusus ini bukan hanya

¹⁷ M. Nur Sholikin, "Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pasar Modal* 8, no. 15 (2018): 79–95.

¹⁸ Ibnu Shina Chandranegara, "Menemukan Formulasi Diet Regulasi," *National Conference of Constitutional and Administrative Law Academician*, no. November (2017): 208–11.

¹⁹ Purnomo Sucipto, "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?", 2015. <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>.

lemah tetapi juga karena ego sektoral dan ego kementerian yang jadi sangat menonjol. Presiden mempunyai visi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Semua rencana kementerian, lembaga nonkementerian, dan daerah akan mendukung visi presiden. Jika semua lembaga melaksanakan visi presiden secara serentak, maka tidak perlu ada konflik kepentingan, seperti ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga non-kementerian, dan ego daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya sudah memberikan sinyal tentang lembaga pembentuk regulasi akan tetapi mengingat kondisi peraturan perundang-undangan yang cukup memprihatinkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, maka lembaga tersebut menjadi sangat urgen. Beliau pun menjelaskan alasan lembaga pembentuk peraturan yang khususnya saat ini belum terlaksana dikarenakan kemungkinan presiden ragu untuk meneruskan niatannya sebab daya, upaya dan anggaran yang difokuskan untuk menangani Pandemi Covid-19. Namun keinginan untuk membentuk lembaga pembentuk regulasi tersebut masih tetap menjadi perhatian.²⁰

Penulis menyadari bahwa Indonesia memang menganut sistem hukum tertulis yang dimana konsekuensinya akan mengakibatkan lahirnya Undang-Undang baru dan peraturan-peraturan baru. Akan tetapi tidaklah menutup kemungkinan bahwa pembentukan regulasi di Indonesia untuk kedepannya dapat meminimalisir maupun mengalami keberhasilan dalam hal permasalahan peraturan dari segi pembentukannya dan segi harmonisasi.

Pembangunan nasional dalam mencapai tujuan negara hanya dapat dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun daerah sehingga berkesinambungan.²¹ Kesadaran setiap lembaga atau instansi negara yang berwenang dalam membentuk atau merancang peraturan dalam konteks yang bukan saat ini saja tapi untuk kedepannya itu hal yang sangat penting untuk dimiliki. Hal ini agar suatu hari kemudian pihak yang berwenang tidak mudah untuk mengadakan atau membuat peraturan baru artinya disini pembentukan suatu peraturan harus bersifat tegas dan matang. Sebagai contoh dalam Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menimbulkan sejumlah permasalahan. Khususnya pada pengaturan terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi. Salah satu pihak yang terkena imbas akibat diberlakukannya kebijakan ini adalah guru honorer.²² Pengalihan kewenangan tersebut ternyata berpengaruh kepada tunjangan yang diterima guru honorer.

²⁰ Wicipto Setiadi, "Restrukturisasi Lembaga Pembentuk Regulasi," 2020.

²¹ Wicipto Setiadi and Ali Imran Nasution, "Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 473–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.473-486>.

²² Eko Suparmiyati, "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional," *Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I* 1, no. 1 (2017):1–324, https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf.

SIMPULAN

Problematika Regulasi di Indonesia masih bermasalah mengenai perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah karena tidak terintegrasinya perencanaan pembentukan regulasi dengan perencanaan pembangunan daerah sehingga akan tidak sinkron dan harmonis karena ada pemisahan skema, kecenderungan pembentukan peraturan Menteri yang berlebihan dari segi kuantitas, serta lemahnya lembaga pembentuk perencanaan pembentukan PP dan Perpres. Tindakan yang perlu untuk dilakukan adalah upaya sinkronisasi sistem perencanaan melalui integrasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan pada tingkat pusat maupun tingkat daerah agar sistem peraturan perundang-undangan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandranegara, Ibnu Shina. "Menemukan Formulasi Diet Regulasi." *National Conference of Constitutional and Administrative Law Academician*, no. November (2017): 208–11.
- Eko Suparmiyati. "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional." *Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I* 1, no. 1 (2017): 1–324.
- Faisal, Rizki Ramadhan, and Aidul Fitriciada Azhari. "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar Di Kota Serang." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 125–37. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4800>.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (June 7, 2018): 53–63. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1731>.
- Konradus, Danggur. "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2017): 198. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.199-207>.
- Kusumaningtyas, Dymas Yulia Putri. "Problematika Model Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca-Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Ummul Qura* XI, no. 1 (2018): 1–15.
- Lasatu, Asri. "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 201. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>.
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>.
- Nugraha, Harry Setya. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (2021): 39–52. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4660>.
- Nur, Insan Tajali. "SINGKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN," 2014, 158–74.

- Priyanta, Maret. "Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 337. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n3.113>.
- Sadiawati, Diani et.al. *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Kementerian PPN/Bappenas, 2019.
- Setiadi, Wicipto. "Restrukturisasi Lembaga Pembentuk Regulasi," 2020.
- . "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan." *Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law* 9, no. 1 (2020): 39–52.
- Setiadi, Wicipto, and Ali Imran Nasution. "Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 473–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.473-486>.
- Sholikin, M. Nur. "Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pasar Modal* 8, no. 15 (2018): 79–95.
- Sihombing, Eka NAM. "Problematisasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (2018): 285–95. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dguc2>.
- Simatupang, Taufik H. "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (2017): 12–25.
- Sinaga, Lazarus, Fakultas Ekonomi, and Universitas Pancasila. "Teknik Perencanaan Tenaga Kerja PT. Unilever TBK." *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic* 10, no. 1 (2019): 8–18.
- Sucipto, Purnomo. "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?," n.d.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Melaksanakan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah